

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan dan keamanan merupakan upaya dalam melindungi keberadaan suatu negara yang dapat menjadi benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman dan serangan yang datang dari luar. Pada dewasa ini studi ilmu hubungan internasional sangatlah berkembang pesat. Dinamika isu-isu hubungan internasional dewasa ini bukan hanya fokus pada isu tradisional namun masih banyak isu yang perlu untuk dibahas. Dalam studi hubungan internasional mencakup beberapa hal terkait perjanjian internasional, diplomasi, konflik dan isu-isu lainnya. Salah satu konflik yang terjadi sampai saat ini adalah konflik antara Taiwan dengan Tiongkok serta adanya keterlibatan negara Amerika Serikat dalam konflik tersebut.

Gambar 1.1 Peta Perbatasan Wilayah Taiwan dan Tiongkok



(Sumber: [Map Taiwan Strait, CNN: https://edition.cnn.com/interactive/maps/world/map.taiwan.strait/frameset.exclude.html](https://edition.cnn.com/interactive/maps/world/map.taiwan.strait/frameset.exclude.html))

Secara geografis Taiwan dengan Tiongkok (daratan) ini sangatlah berdekatan yang hanya dipisahkan oleh Selat Taiwan. Hal ini menjadi salah satu peluang bagi Taiwan untuk memisahkan diri dari Tiongkok.

Runtuhnya kekaisaran Qing kemudian menyisakan dua kubu yang sama-sama kuat yaitu Partai Komunis yang didukung oleh Uni Soviet dan Partai Nasionalis atau Kuomintang yang didukung oleh Amerika Serikat.

Sejak berakhirnya Dinasti Qing pada tahun 1912, karena kekalahan Tiongkok dari Jepang sehingga Tiongkok mengakibatkan kehilangan atas wilayah Taiwan sebagai syarat bahwa pemerintahan Qing harus menyerahkan wilayah Taiwan untuk menghentikan perang. Penduduk Taiwan bangkit dan mendeklarasikan atas berdirinya Republik Taiwan. Sehingga Taiwan menjadi bagian dari pasukan perang Kekaisaran Jepang di Perang Dunia Kedua sampai kekalahan Jepang di tahun 1945. Perjanjian ini disebut Perjanjian Shimonoseki yang mengawali sejarah 50 tahun pendudukan Jepang di Korea dan Taiwan dalam mengakhiri peperangan Jiawu. Dalam hal ini Dinasti Qing menyerahkan kedaulatan Taiwan dan kepulauan Penghu kepada Jepang. Akan tetapi Taiwan meminta kepada Dinasti Qing untuk melepaskan dari perjanjian tersebut, namun tetap tidak ada respon dari Qing sehingga membuat Taiwan mencari bantuan dari pihak luar (Wicaksono, Republik Tiongkok (1912-1949), 2015, pp. 47-48).

Sun Yat-sen merupakan tokoh revolusi pada era pemerintahan demokrasi baik di Taiwan maupun di Tiongkok (Wicaksono, 2015, p. 79). Sun Yat-sen memiliki ide-ide revolusioner untuk menggulingkan pemerintah dari Zheng Shiliang yaitu rekan di Boji sebagai anggota perkumpulan Triad. Hal ini menjadi awal mula idealisme revolusionernya Sun Yat-sen. Sun berpendapat bahwa sistem demokrasi dalam bentuk pemerintahan republik lebih baik. Di mana rakyat mempunyai hak untuk memberikan suara dalam menentukan jalannya pemerintahan negara (Wicaksono, 2015, pp. 81-82). Alasan berdirinya Partai Nasionalis atau Kuomintang pada 15 Agustus 1912 dikarenakan ketidakpuasan rakyat Tiongkok terhadap pemerintah. Sehingga kaum revolusioner menyusun sebuah partai politik yang beroperasi secara profesional sebagai

wadah dalam menampung aspirasi rakyat dan mengendalikan kekuasaan (Wicaksono, 2015, p. 140).

Selain Kuomintang, muncul juga kekuasaan antara Partai Nasionalis atau Kuomintang dan Partai Komunis. Kelompok partai Komunis ini berkuasa dan mempunyai pengaruh besar pada tahun 1930-an. Hingga berakhirnya perang dunia kedua, Partai Komunis ini mempunyai dukungan yang besar dari sebagian rakyat Tiongkok. Partai Komunis juga memanfaatkan keberhasilan Partai Kuomintang untuk menyebarkan ideologinya dengan cara menyusup ke dalam partai Kuomintang pada tahun 1922 (Wicaksono, 2015, p. 269). Taiwan yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Nasionalis Kuomintang, akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Tiongkok yang pada saat itu dikuasai oleh pihak Komunis. Akibatnya, terpecahnya sistem pemerintahan dari keduanya terpecah menjadi dua sistem pemerintahan yang berbeda di daratan Tiongkok (Tanasaldy, 2017, p. 3).

Partai Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek, yang beraliran Nasionalis kemudian membentuk negara sendiri setelah kekalahannya dalam perang sipil melawan Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong (Sujadmiko, 2010). Taiwan sejak sepeninggalan presiden Chai Kai-shek sudah memiliki enam presiden yaitu Yen Chia-kan (1975-1978), Chiang Ching-kuo (1978-1988) yang merupakan anak Chiang Kai-shek, Lee Teng-hui (1988-2000), Chen Shui-bian (2000-2008), Ma Ying-jeou (2008-2016), dan sekarang Tsai Ing-wen. Presiden Lee Teng-hui menjadi salah satu pemimpin yang bukan kelahiran dari daratan Tiongkok (Tanasaldy, 2017, p. 4).

Pada dasarnya Taiwan sudah memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai negara yang berdaulat yaitu mempunyai pemerintahan, penduduk, dan wilayah. Namun, ada beberapa hal yang menjadi titik permasalahan mengapa Taiwan tidak bisa menjadi sebuah negara yang berdaulat.

Sejak tahun 1949, Tiongkok sudah menerapkan *One China Policy* (Kebijakan Satu China) yang menegaskan bahwa hanya ada satu negara Tiongkok di dunia. Prinsip ini sangat dilematis karena pada kenyataannya ada dua sistem pemerintahan sehingga sering diistilahkan negara dengan *dual-system nation* (sistem ganda), dua rezim sistem yang saling berkompetisi, saling mengklaim berdaulat atas rakyat dan wilayah yang sama dalam menguasai sebagian penduduk dan wilayah yang diperebutkan. Sehingga menyebabkan keduanya menerapkan doktrin *Hallstein*, di mana suatu negara tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain yang telah menjalin hubungan diplomatiknya dengan negara lawannya dan tidak akan berpartisipasi dalam suatu organisasi internasionalnya apabila lawannya telah berpartisipasi (Tanasaldy, 2017).

Masalah isu perpecahan Taiwan dan Tiongkok juga mempunyai campur tangan Amerika Serikat yang memandang bahwa Tiongkok berideologi komunis, sehingga menjadi ancaman besar bagi kepentingan Amerika Serikat di Asia Timur dan menjadikan Taiwan sebagai aliansi dari Amerika Serikat (Wicaksono, 2017, p. 285). Keterlibatan Amerika Serikat pada tahun 1954 membentuk *Mutual Defense Treaty* (Fakta Pertahanan Bersama) dimana isi perjanjiannya yaitu Taiwan bagian penting dalam strategi pertahanan Amerika Serikat di Asia Pasifik. Maka dari itu setiap serangan terhadap Taiwan merupakan serangan terhadap Amerika Serikat juga. Amerika Serikat wajib memberikan perlindungan dan bantuan kepada Taiwan apabila diserang (Tanasaldy, 2017). Tindakan ini sering dianggap oleh Tiongkok sebagai ikut campur dalam permasalahan internal Tiongkok. Hal ini memicu kemarahan Tiongkok dalam mengancam tindakan Amerika Serikat sebagai usahanya dalam memecah belah bangsa Tiongkok.

Secara historis Taiwan dianggap oleh Tiongkok sebagai bagian integral dari wilayahnya, namun disintegrasi tersebut membuat sebagian rakyat Taiwan merasa bukan dari bagian Tiongkok. Pada tanggal 29 Mei 1971, Tiongkok

sebelumnya meminta penjelasan atas kedudukan posisi Amerika Serikat di Taiwan, karena Tiongkok tidak akan mau menerima proposal apapun tentang pembentukan “Dua Tiongkok” atau “Satu Tiongkok dan Satu Taiwan” yang berarti mendudukan Taiwan sebagai negara yang merdeka dan sederajat dengan pemerintah Beijing (Wicaksono, 2017, p. 298). Amerika Serikat menganggap dirinya sebagai pemimpin liberalisme global dan dunia merdeka. Di mana hak asasi manusia dijunjung tinggi dan semua orang memiliki hak untuk kemerdekaan dan menyuarakan pendapatnya. Hal ini didukung oleh perekonomian Amerika Serikat yang sudah sangat maju (Wicaksono, 2017, pp. 479-480).

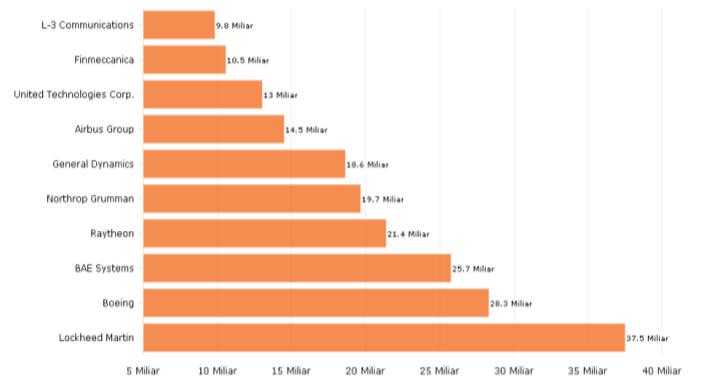
Taiwan diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari Tiongkok dan menjadi bagian dari isu internal, di mana Taiwan tidak diizinkan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Amerika Serikat bukan tidak percaya Taiwan dapat menyeimbangkan kekuasaan dan dapat meningkatkan keseimbangannya, melainkan ini karena adanya kepercayaan efek domino. Efek domino ini terjadi karena Amerika menganggap bahwa Taiwan terkena pengaruh komunis dan mengancam status Amerika sebagai salah satu negara adidaya di dunia. Di mana apabila Amerika kehilangan Taiwan, maka Amerika Serikat akan mengalami kerugian. Taiwan dan Amerika Serikat memiliki kesamaan ideologi yaitu *capitalist democracy* (Hughes, 1997) (Yahuda, 1996).

Amerika Serikat merasa perlu bertindak untuk mengamankan kepentingannya di Asia Timur. Hal tersebut dimanfaatkan Amerika Serikat yang mulai melancarkan intervensi sejak tahun 1950-an. Akibatnya, Taiwan menjadi rebutan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam pengaruh regional.

Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Jimmy Carter, telah meloloskan Undang-undang Hubungan Taiwan (*Taiwan Relations Act*) pada tahun 1979. Dengan tujuan untuk membantu mempertahankan perdamaian, keamanan, dan

stabilitas di Pasifik Barat. Amerika Serikat juga mempromosikan kebijakan politiknya dengan mengizinkan keberlanjutan hubungan perdagangan, kebudayaan, dan hubungan lain antara rakyat Amerika Serikat dengan Taiwan (Wicaksono, 2017, p. 515).

Table 1.1 Perusahaan Dengan Penjualan Senjata Terbesar Pada Tahun 2014



(Sumber: The Military and Defense Industry: An Economic Force in U.S: <https://siteselection.com/issues/2012/sep/sas-military-economy.cfm>)

Berdasarkan *Taiwan Relations Act 1979*, Amerika Serikat terus menjual senjata ke Taiwan selama tiga dekade. Setelah *Taiwan Relations Act* diimplementasikan pada tahun 1980-2010, Amerika Serikat telah menjual senjata ke Taiwan sebesar 25,39 miliar USD. Setelah Perang Dingin, Amerika Serikat semakin gencar menjual senjata ke Taiwan. Pada tahun 1990-2007, Amerika Serikat berperan besar dalam memperkuat kapabilitas tentara Taiwan tidak hanya Selat Taiwan, tetapi juga *Taiwanese Air Defense Identification Zone (TADIZ)* (Wang G. T., 2006). Pada bulan Januari tahun 2010, Amerika Serikat menjual paket persenjataan senilai 6,4 miliar USD kepada Taiwan. Amerika Serikat menegaskan bahwa transfer persenjataan itu merupakan wujud dari komitmen dalam melaksanakan perjanjian *Taiwan Relation Act* dengan menyediakan senjata pertahanan diri yang dibutuhkan oleh

Taiwan (CNN, U.S. announces \$6.4 billion arms deal with Taiwan, 2010).

Di tahun 2017, Taiwan menempati urutan kedelapan di dunia sebagai negara importir senjata dari Amerika Serikat dan menjadi urutan pertama di kawasan Asia Timur. Taiwan merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhan perekonomian pasar dalam importir persenjataan Amerika Serikat. Tahun 2010-2017, ekspor Amerika kepada Taiwan mencapai total 3,438 milyar dolar Amerika sehingga kenaikan ini dinilai signifikan antara tahun 2010-2014. Dalam hal ini di tahun 2014 mencapai angka terbesar sebesar 1,071 milyar dolar Amerika dan di tahun 2017 angkat ekspor senjata Amerika di kawasan Asia Timur mencapai 493 juta dolar Amerika Serikat.

Table 1.2 Nilai Ekspor Amerika Serikat ke Negara Importir

Negara	Nilai Ekspor dalam Juta Dolar Amerika Serikat
Arab Saudi	3.425
Australia	1.172
Inggris	698
Israel	515
Irak	506
Uni Emirat Arab	499
Qatar	496
Taiwan	493
Jepang	479
Korea Selatan	456

(Sumber: Statista. The Statistic Portal. U.S. arms export 2017, by country (in TIV expressed in million constant 1990 U.S. dolar))

Table 1.3 Nilai Ekspor Senjata Amerika Serikat ke Taiwan Pada Tahun 2010-2017

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Nilai Ekspor (dalam juta dolar)	37	138	424	549	1071	630	97	493	3438

(Sumber: SIPRL. Arms Trade: http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php)

Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen menolak *One China Policy* dan terus memperjuangkan kemerdekaan Taiwan dengan berbagai cara. Sebaliknya, Presiden Tiongkok, Xi Jinping dengan tegas menolak kemerdekaan Taiwan dan bersikeras mempertahankan Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok. Kebijakan *One China Policy* mendapat reaksi negatif dari Taiwan, karena Taiwan tidak berkeinginan untuk bergabung dengan Tiongkok. Taiwan menganggap negaranya telah berdaulat secara *de facto* dan sudah terqualifikasi sebagai sebuah negara. Xi Jinping bertekad menggagalkan upaya Taiwan dalam memerdekakan diri dari Tiongkok dan menegaskan untuk tetap menjunjung tinggi prinsip *One China Policy*. Tiongkok tetap memegang teguh atas klaimnya mengenai Taiwan meski sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak hal tersebut (Horton, 2018).

Dalam kepemimpinan Tsai Ing-wen dalam memerintah, Tiongkok meningkatkan pengawasan dan tekanan yang bertujuan membatasi kemampuan Tsai Ing-wen. Keberadaan Amerika Serikat dalam membantu Taiwan sebagai ancaman bagi kepentingan nasional Tiongkok. Hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan dalam bidang persenjataan menjadi erat karena ada ikatan berupa perjanjian yaitu salah

satunya dalam mengirimkan senjata dan modernisasi militer Taiwan (Darmawan, 2015).

Menurut Tsai Ing-wen masa depan Taiwan tidak bergantung pada Tiongkok melainkan pada dunia. Dengan keberhasilan Taiwan dalam pembangunan ekonomi yang terlihat dari sisi pendapatan perkapita, tabungan domestik, dan devisa yang sangat besar, menjadi peluang Taiwan untuk meningkatkan perdagangan, memberi bantuan luar negeri, dan menambah investasi luar negeri. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Tiongkok harus menghormati keinginan Taiwan untuk memiliki kebebasan dan demokrasi serta harus menerima kenyataan bahwa terdapat perbedaan fundamental dalam sistem-sistem nilai, gaya hidup, dan politik diantara keduanya (Tanasaldy, 2017). Taiwan menolak prinsip *One China Policy* dan Tiongkok tidak perlu untuk menggunakan intimidasi melalui kekuatan militer yang mengancam kestabilan di wilayah Selat Taiwan (CNN, 2021).

Dalam pidatonya di Hari Nasional Taiwan, Tsai Ing-wen mengungkapkan bahwa Tsai akan mempertahankan demokrasi dan kedaulatan Taiwan. Ia juga menegaskan bahwa Taiwan tidak akan tunduk pada tekanan Tiongkok dan akan terus mempertahankan serta memperkuat kawasan dari ancaman Tiongkok. (Anonim, Di Hari Nasional Taiwan Tsai Ing-Wen Bersumpah Tak Akan Tunduk pada Tekanan China, 2021)

Taiwan dan Tiongkok sama-sama mempertahankan kedaulatannya serta meningkatkan keamanan dan pertahanannya. Amerika Serikat menjadi salah satu pendukung Taiwan dalam melepaskan diri dari klaim Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibahas, karena ini merupakan isu konflik yang sangat sensitif serta adanya keterlibatan pihak ketiga dalam isu tersebut. Apabila Taiwan memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Tiongkok, maka upaya Tiongkok dalam mempertahankan Taiwan akan semakin sulit. Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan cukup besar

menjadi ancaman serius bagi Tiongkok. Amerika Serikat terus menjual senjata terhadap Taiwan di bawah perjanjian hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat. Tidak hanya persenjataan, namun Amerika Serikat juga menjual kapal selam ke Taiwan. Amerika Serikat sebagai aliansi dari Taiwan mendorong untuk terus memodernisasi senjata militer mereka dan meningkatkan kemampuan militer sebagai bentuk pertahanan keamanan Taiwan (Pristiandaru, 2021).

Hubungan Taiwan dan Tiongkok pun kembali renggang setelah transisi Gedung Putih, ketika Trump menerima ucapan selamat dari Presiden Tsai Ing-Wen yang melanggar protokol diplomatik selama 40 tahun hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Tsai Ing-wen bersama Trump membahas terkait kerjasama dalam penguatan interaksi bilateral dalam ekonomi, politik, dan keamanan. Maka dari itu Tiongkok gencar meningkatkan kapabilitasnya, salah satunya dengan melakukan rangkaian uji coba latihan militer dengan menembakan senjata ke Selat Taiwan. (Xiangwei, 2018).

Dalam menanggapi respon dari Taiwan, Tiongkok menaikkan anggaran pertahanan untuk membangun kekuatan militer dan mengikis pengaruh Amerika Serikat. Anggaran tersebut sebesar 7,5 persen pada tahun 2019 (Irfani, 2019). Tiongkok juga mengembangkan senjata Railgun yaitu senjata bertenaga elektromagnetik yang dipasang pada salah satu kapal perang. Kapal tersebut sepanjang 118meter dan merupakan kapal pendarat tank yang dirancang untuk berjalan di garis pantai musuh dan mencurahkan 10 tank atau 500ton kargo. Railgun ini akan digunakan Tiongkok sebagai ancaman bagi negara lawannya dan sekutu-sekutunya (Hasan, 2019). Tiongkok mengembangkan senjata presisi, jaringan tempur yang canggih, dan membuat Tiongkok lebih dominan di kawasan Taiwan. Tiongkok menggunakan strategi mata-mata di bidang industri dan teknis untuk menganalisis dan mengeksploitasi kelemahan lawan (Utomo, 2019).

Dalam memberikan ancaman militernya terhadap Taiwan, Tiongkok memodernisasi angkatan laut militer yang merupakan kunci modernisasi militer Tiongkok yang mengerahkan kekuatan militernya ke wilayah Taiwan. Tiongkok juga mengirim kapal induk yang melintasi Selat Taiwan sebagai peringatan kepada pihak yang ingin memecah belah hubungan Tiongkok dengan Taiwan (Perdana, 2018). Tiongkok membatasi warga negaranya untuk berkunjung ke Taiwan dari 47 kota yang ada di Tiongkok daratan. Alasannya yaitu apabila warganya berkunjung ke Taiwan, maka hal itu akan mempengaruhi perekonomian Taiwan dan berhubungan dengan lintas selat kawasan. Ini merupakan efek jera bagi Taiwan dari Tiongkok (Oktaveri, 2019).

Taiwan adalah wilayah prioritas utama Tiongkok dalam merebut kembali kekuasaan dengan cara memberikan ancaman militer di kawasan tersebut. Tiongkok memberikan ancaman militer untuk membuat Amerika Serikat khawatir, dengan menciptakan kemampuan militernya di beberapa wilayah yang dirancang untuk menghalangi dari Amerika dan Taiwan. Tiongkok melakukan segala cara termasuk ancaman militer dalam mempertahankan Taiwan. Baik melalui udara maupun perairan Taiwan. Ancaman Tiongkok meningkat ketika bujukan ekonomi dan politik gagal membuat Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok. (Jazeera, 2019)

Ancaman militer bagi Taiwan oleh Tiongkok yaitu setiap harinya mengirimkan jet tempur dan pesawat pengintai ke wilayah Taiwan (CNN, 2021). Negara Tiongkok juga mengirimkan 28 jet tempur ke wilayah selat Taiwan sebagai bentuk tindakan untuk menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Berbagai pesawat militer Tiongkok termasuk jet tempur, bomber, dan pesawat anti-kapal selam yang dapat mengangkut senjata nuklir dan masuk ke *Taiwanese Air Defense Identification Zone* (TADIZ) (Dea, 2021).

Sebanyak 380 jet tempur menyerang wilayah Taiwan yang menjadi rekor tertinggi sejak Krisis Rudal 1996. Pada

tahun 2016, jet tempur Tiongkok terbang lebih dekat ke Taiwan memasuki zona TADIZ selama 110 hari. Sepanjang tahunnya, Tiongkok melakukan enam misi pelatihan jarak jauh di sekitar Taiwan dan pada tahun 2017 sebanyak dua puluh kali. Tindakan ini sebagai bentuk peringatan terhadap Taiwan agar menyerah dalam mempertahankan keinginannya untuk menjadi negara yang merdeka (Kurniawan, 2021).

Taiwan merespon ancaman dari Tiongkok dengan tetap bersikukuh dapat merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Presiden Tsai Ing-wen terus berupaya mencari pengakuan internasional bagi Taiwan dan terus mendekatkan diri kepada aliansinya yaitu Amerika Serikat (CNN, 2021).

Taiwan tetap menegaskan kemerdekaannya sehingga Tiongkok menanggapi dengan memberikan peringatan terhadap upaya yang dilakukan oleh Taiwan agar terbebas dari Tiongkok. Hal itu ditanggapi oleh angkatan bersenjata dan secara implisit mengancam Amerika Serikat apabila ikut campur tangan. Tiongkok juga akan melakukan segala cara agar Taiwan tunduk terhadap Tiongkok. Dalam hal ini membuat Taiwan meningkatkan kembali kapabilitas militernya dengan cara melakukan pembelian senjata tercanggih dari Amerika Serikat seperti teknologi kapal selam dan sistem persenjataannya, Jet Tempur F-35, dan M1A2 Abrams. Presiden Tsai Ing-wen meminta Tiongkok untuk mengupayakan cara-cara damai dalam menyelesaikan perselisihan di antara Taiwan dan Tiongkok serta menghormati nilai-nilai demokrasi yang sudah dianut sejak lama oleh Taiwan (VoA, 2019).

Dalam hal ini ancaman militer yang diberikan kepada Taiwan serta berbagai respon dari Taiwan, membuat Tiongkok terus memodernisasi kekuatan militernya, persenjataan termasuk rudal balistik nuklir, dan mengembangkan bahan bakar untuk reaktor nuklir generasi baru yang nantinya dapat dipakai untuk membuat hulu ledak nuklir. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara serta

melawan pihak asing yang ikut campur dalam permasalahan negara tersebut (CNN, 2021). Tiongkok mengutuk terhadap siapapun yang mendukung Taiwan merdeka dan mendirikan pemerintah yang terpisah. Hal ini adalah sebagai bentuk perlawanan keras Tiongkok termasuk Amerika Serikat yang menjadi aliansi dari Taiwan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan dengan mengingat keterkaitan dengan judul ini, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah *“Bagaimana respon Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap ancaman militer Tiongkok (2018-2019)?”*

C. Kerangka Teoritis

Untuk menjelaskan latar belakang masalah yang dibahas, penulis menggunakan dua kerangka teori, yaitu konsep *Balance of Threat* dan konsep *Alliance*. Kedua kerangka teori ini dipandang relevan dengan kasus yang sedang dibahas karena mampu menjabarkan secara terperinci tentang respon Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap ancaman militer Tiongkok 2018-2019.

Teori ini mengambil dua konsep yaitu *balance of threat* dan *alliance* di mana kedua konsep ini adalah apabila suatu negara mendapatkan suatu ancaman, maka negara akan melakukan kerja sama dan menyeimbangkan ancaman tersebut.

C.1. Konsep Balance of Threat

Teori *Balance of Threat* oleh Stephen M. Walt menekankan pada upaya perimbangan dalam mengatasi ancaman yang ada, bukan mengimbangi kekuatan lawan. Untuk melihat tingkatan ancaman dari pihak lain, *Balance of Threat* memiliki daya ukur untuk melihat seberapa jauh kekuatan lawan dan kekuatan nasional dalam melakukan perimbangan suatu ancaman (Walt, 1987).

Ada empat aspek yang dikemukakan oleh Stephen Walt dalam melihat ancaman yang dimiliki negara lain dan menjadi daya ukur kekuatan negara untuk memberikan dampak ancaman, yaitu *aggregate power* (total kekuatan negara), *geographic proximity* (kedekatan geografis), *offensive power* (kapabilitas militer yang bersifat ofensif), dan *aggressive Intention* (mampu menunjukkan sifat yang agresif terhadap lawan) (Planifolia, 2017).

Aggregate power yaitu kekuatan relatif yang dimiliki oleh suatu negara, seperti kemampuan industri, kapasitas militer, kekuatan ekonomi yang dilihat dari total *Gross Domestic Product* (GDP), dan kemajuan teknologi (Walt, 1987). Peningkatan kapabilitas suatu negara, terutama militer akan menimbulkan ancaman bagi negara lain. *Geographic Proximity* yaitu ancaman yang ditimbulkan karena dekatnya letak geografis. Apabila semakin dekat jarak antar negara, maka semakin besar potensi ancaman yang ditimbulkan (Walt, 1987, p. 23). Pemikiran suatu negara akan mempertimbangkan ancaman terdekat daripada ancaman yang ditimbulkan oleh negara yang berada lebih jauh. Jauh dekatnya jarak akan berpengaruh pada sifat agresif negara, sehingga membutuhkan kapabilitas nasional yang lebih besar apabila ingin menjangkau letak negara yang jauh (Dwivedi, 2012, pp. 224-237).

Offensive Power yaitu kapabilitas militer suatu negara yang bersifat menyerang. Kekuatan militer yang berkemampuan menyerang akan memberikan ancaman bagi negara lain (Walt, 1987, p. 4). Dengan kapabilitas militer suatu negara yang semakin besar, maka dapat memicu terjadinya aliansi dengan negara lain terutama dengan negara yang berkapabilitas militer lebih lemah. *Offensive power* dapat dibangun apabila negara itu memiliki sumber daya manusia yang mencukupi, kemampuan mengembangkan nuklir, daya jangkau pertahanan yang melebihi batas negaranya, serta mengembangkan teknologi militer yang ditopang dengan kekuatan ekonomi (Walt, 1987, p. 24). *Aggressive Intention* yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu negara dalam memprovokasi negara lain yang sama-

sama merasa terancam oleh kekuatan musuh (Walt, 1987, p. 25). Buzan menyatakan bahwa ancaman dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan sejarah yang tidak harmonis dan berdampak pada keamanan terutama sektor militer (Buzan, 1998).

Suatu negara selalu meningkatkan kemampuan persenjataannya dan menjadikan perlombaan senjata atau *arms race*, di mana kondisi akibat setiap negara yang menginginkan keamanan nasional sebagai tujuannya juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi persenjataan yang semakin maju. Hal tersebut menjadi alasan antara Taiwan dan Tiongkok dalam menyeimbangkan ancamannya atau *Balance of Threat* disertai keterlibatan Amerika Serikat sebagai pihak yang mendukung dan membela Taiwan dalam memerdekakan wilayahnya serta menolak kebijakan Tiongkok dalam *One China Policy*.

Dengan adanya *Balance of Threat* ini Taiwan mampu meningkatkan ancaman terhadap Tiongkok. Dengan membeli dan menambah kapasitas persenjataan dan memperkuat militernya dari Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat sebagai aliansinya dalam menghadapi ancaman militer Tiongkok, sesuai dengan perjanjian *Taiwan Relations Act* tahun 1979. Dengan keempat aspek yang dikemukakan oleh Stephen M. Walt, Taiwan memenuhi kualifikasi dari kekuatan negara (*aggregate power*) melalui pertumbuhan ekonomi serta teknologi yang dimiliki oleh Taiwan dan semakin berkembang pesat dalam modernisasi militernya. Sehingga Taiwan mampu menyeimbangkan kekuatan terhadap ancaman Tiongkok. Kedekatan letak geografis (*geographic proximity*) ini adalah Taiwan dan Tiongkok berada di wilayah geografis yang saling berdekatan satu sama lain, sehingga semakin besar ancaman yang ditimbulkan dari keduanya. Kapabilitas militer yang bersifat ofensif (*offensive power*) ini bentuk berkemampuan untuk menyerang dan memberikan ancaman bagi Tiongkok dengan cara membeli dan meningkatkan kapabilitas militer di kawasan Taiwan. Sehingga Taiwan beraliansi dengan Amerika Serikat untuk menunjukkan sifat yang agresif terhadap lawan

(*aggressiv intention*) karena Taiwan dan Amerika Serikat ini sama-sama memiliki ancaman dari Tiongkok.

C.2. Konsep Alliance

Teori konsep *Alliance* ini didefinisikan sebagai komitmen yang formal dengan timbal balik. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam bantuan militer apabila salah satu mitra aliansi diserang (Morgenthau, 1959) (Reiter, 1994). *Alliance* ini adalah asosiasi formal terhadap suatu ancaman negara tersebut. *Alliance* ini dari fenomena di mana dibedakan berdasarkan "*Alignment*" atau penyelarasan terhadap harapan atau tujuan kepentingan yang sama antara dua negara atau lebih serta saling mendukung dalam perselisihan atau perang dengan negara bagian tertentu (Snyder, 1990) (Chun, 2000).

Regionalisme adalah adanya interaksi atau hubungan baik antar individu, lembaga swadaya masyarakat, barang, dan finansial di mana semuanya saling berkaitan dengan hubungan politik dan kerjasama militer di sebuah kawasan (Maksum, 2017, p. 1). Regionalisme ini mencakup di bidang ekonomi, sosial, politik, dan keamanan untuk mengintegrasikan dan meningkatkan kerja sama antar negara di sebuah kawasan (Maksum, 2017, p. 2). Dalam hal ini berkaitan dengan konflik Laut China Selatan yang berdekatan langsung dengan Taiwan sehingga melibatkan Amerika Serikat.

Persengketaan antara Taiwan dan Tiongkok dalam perbedaan ideologi serta *One China Policy* ini menyebabkan pihak dari Taiwan membutuhkan keamanan serta benteng pertahanan dalam melawan Tiongkok dan mempertahankan ideologinya. Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kekuatan militer yang besar dan negara pemasok senjata untuk Taiwan bersedia menjaga keamanan dan pertahanan Taiwan. Amerika Serikat menjual dan menyediakan senjata tercanggih untuk Taiwan. Berawal dari perang korea dan berakhir dengan perjanjian *Mutual Defense Treaty* pada tahun 1954 untuk

menanggulangi masalah ancaman Tiongkok. Sejak saat itu Taiwan banyak menerima bantuan dari Amerika Serikat dalam ekonomi, militer demi keamanan, pertahanan, dan masa depan pembangunan Taiwan.

Amerika Serikat tetap melanjutkan penjualan peralatan pertahanan militer ke Taiwan sesuai dengan aturan *Taiwan Relations Act* (TRA) 1979 merupakan kontrak kerja sama dengan Taiwan yang berisi tentang menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kesepakatan aturan *Taiwan Relations Act* 1979 juga termasuk dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menjaga relasi dengan Taiwan. Adanya perjanjian ini menjadi pilar bagi keduanya untuk menjalin hubungan kerjasama militer hingga saat ini.

Amerika Serikat sebagai negara yang beraliansi dengan Taiwan menunjukkan dukungannya untuk menjadi negara yang demokrasi yang mengatasmakan perdamaian dunia. Taiwan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melakukan inisiatif, dengan menjual dan menyediakan senjata tercanggih sehingga Taiwan berusaha untuk membentuk image negara yang memiliki *power* (Budiarjo, 2008). Adanya kesepakatan *Taiwan Relation Act* ini menjadi salah satu senjata Taiwan dalam melawan ancaman Tiongkok dan sebagai bentuk pertahanan diri atas dukungan Amerika Serikat.

D. Hipotesa

Respon Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap ancaman militer Tiongkok 2018-2019:

1. Meningkatkan kapabilitas senjata militernya untuk menyeimbangkan Tiongkok.
2. Meningkatkan aliansi dengan Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman militer Tiongkok.

E. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan penjabaran tentang respon Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap ancaman militer Tiongkok 2018-2019, yaitu:

1. Untuk mengetahui respon Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap ancaman militer Tiongkok 2018-2019.
2. Untuk mengetahui kerjasama militer antara Taiwan dengan Amerika Serikat sebagai negara aliansinya dengan meningkatkan pertahanan dan keamanan di wilayah Taiwan sesuai perjanjian *Taiwan Relation Act 1979* serta meningkatkan persenjataan militer untuk menghindari ancaman militer dari Tiongkok.
3. Untuk menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa yang dikemukakan.
4. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.
5. Untuk memenuhi kewajiban akademis dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Penulisan ini akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu:

1. Berdasarkan data-data sekunder baik dari buku, majalah, artikel, jurnal, surat kabar, internet, maupun bentuk-bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek penulisan. Dengan menggunakan data seperti ini maka dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan karya tulis dan penelitiannya.
2. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data terkait hal-hal yang melatarbelakangi hubungan dan strategi Taiwan terhadap ancaman Tiongkok terutama sejak

diterbitkannya informasi mengenai Taiwan dan Tiongkok dalam 10 tahun terakhir. Agar fokus penelitian lebih spesifik, maka cakupannya dibatasi sejak masa pemerintahan Tsai Ing-wen pada tahun 2018-2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dari skripsi yang penulis angkat adalah:

BAB I: Pendahuluan yang berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritis, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Sejarah konflik antara Taiwan dengan Tiongkok. Dalam bab ini penulis menjelaskan sejarah atau pemicu awal yang menyebabkan konflik antara Taiwan dengan Tiongkok sebelum dan sesudah perang dunia kedua, dinamika konflik Taiwan dengan Tiongkok pasca perang dingin, serta dinamika konflik hubungan Taiwan dengan Tiongkok pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen.

BAB III: Ancaman Militer Tiongkok terhadap Taiwan pada tahun 2018-2019. Dalam bab ini penulis membahas tentang kebijakan militer Tiongkok terhadap Taiwan, kepentingan Tiongkok dalam mempertahankan Taiwan, dan ancaman militer Tiongkok terhadap Taiwan sebagai bentuk penegasan dalam mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara.

BAB IV: Respon Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap ancaman militer Tiongkok 2018-2019. Dalam bab ini penulis membahas mengenai respon Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing-wen terhadap ancaman militer Tiongkok 2018-2019 yang dianalisis dengan menggunakan konsep *balance of threat* dan *alliance* dalam menanggapi konflik antara Taiwan dan Tiongkok. Perkembangan terkini mengenai hubungan Taiwan dengan Tiongkok dalam isu konflik pemisahan Taiwan dari Tiongkok, serta strategi Taiwan dalam meningkatkan senjata militernya

terhadap ancaman militer Tiongkok dengan membeli senjata modern kepada Amerika Serikat sebagai aliansinya Taiwan.

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan.